ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Penerbitan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) dalam Berulangkali dalam Kasus La Nyalla Mattaliti dalam Prespektif Asas Kepastian Hukum Islam " Skripsi ini merupakan penelitian untuk menjawab pertanyaan, 1) Bagaimana Penerbitan Surat Perintah Penyidikan (SPRINDIK) dalam kasus La Nyalla Mattaliti? 2) Bagaimana penerbitan surat perintah penyidikan (Sprindik) berulangkali dalam kasus La Nyalla Mattaliti perspektif asas kepastian hukum islam?

Penelitian ini adalah penelitian empiris, Penelitian hukum empiris didasarkan pada kenyataan di lapangan atau melalui observasi (pengamatan) langsung. Berkenan dengan tipologi dan klasifikasi penelitian, hukum normatif desertakan dengan penelitian hukum *doctrinal* (doktrin), sedangkan penelitian hukum empiris disertakan dengan penelitian *non doctrinal (*tanpa doktrin*)*. Penelitian hukum empiris yang mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektifitas hukum. Penelitian hukum empiris hendak mengadakan pengukuran terhadap peraturan perundang-undangan tertentu mengenai efektivitasnya, maka definisi-definisi operasional dapat diambil dari peraturan perundang-undangan.

Dari skripsi ini dapat disimpulkan 1) bahwa berawal dari penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi penyalahgunaan bantuan dana hibah yang diterima kamar dagang dan industri Jawa Timur (KADIN JATIM) dari pemprov Jawa Timur tersangka Diar Kusuma Putra dan tersangka Nelson Sembiring dengan dasar surat perintah penyidikan KEJATI No.Print -163/0.5/Fd.1/02/2015 tanggal 17 februari 2015 dan surat perintah penyidikan No.Print-164/0.5/Fd.1/02/2015 tanggal 17 februari 2015. 2) Bahwa dalam hukum islam tentang penerbitan surat perintah penyidik (SPRINDIK) dalam kasus La Nyalla Mattaliti perspektif asas kepastian hukum islam. Menurut peneliti, perbuatan yang dilakukan oleh tersangka termasuk dalam unsur *jarimah ta'zir.* Karena dengan alasan terdakwa mau mengembalikan seluruh kerugian Negara yang bernilai Rp. 5.359.479.150.- yang disebabkan olehnya.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, sebaiknya penegak hukum lebih detail untuk mengambil suatu keputusan agar tidak terjadi kesalahan fatal sehingga manfaat, keadilan, dan kepastian hukum dapat terealisasikan di masyarakat secara ril.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id